



RENCANA KERJA

2024

BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Mengacu pada pasal 11 ayat (3), pasal 15 ayat (1) dan pasal 126 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) secara tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rangka memelihara kesinambungan perencanaan pembangunan, Renja BAPPEDA tahun 2024 disusun dengan mencermati hasil capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan.

Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target dari indikator kinerja dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024. Lebih lanjut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja BAPPEDA tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA pada R-APBD T.A. 2024.

Akhir kata, kami berharap semoga Renja ini bermanfaat dan memberi kontribusi dalam pencapaian visi - misi pembangunan di Provinsi Lampung.



KEPALA BAPPEDA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (kelima) dari Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan disusun dengan merujuk pada Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dimana nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka indikator, satuan dan target kinerja yang terdapat pada Renja Tahun 2024 telah menyesuaikan peraturan tersebut. Pada tahun 2024 mendatang BAPPEDA Provinsi Lampung akan melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan rencana alokasi anggaran Rp. 39.177.468.458,-

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang dalam Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 akan diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) Sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 dan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**

Bandar Lampung, Januari 2023

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	8
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	16
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	36
2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Provinsi Lampung.....	53
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	56
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64
4.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung.....	64
4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA	65
BAB V. PENUTUP	77
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	77
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	78
5.3 Rencana Tindaklanjut.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.....	16
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022.....	33
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2019-2024	45
Tabel 2.5	Reviu terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023.....	48
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Perubahan RPJMD.....	48
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA.....	50
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	52
Tabel 4.1	Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024.....	60

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung.....	2
Gambar 2.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	8
Gambar 3.1	Cascading Misi P RPJMD s/d Tujuan dan Sasaran BAPPEDA.....	49
Gambar 4.1	Visi dan Misi Provinsi Lampung.....	58



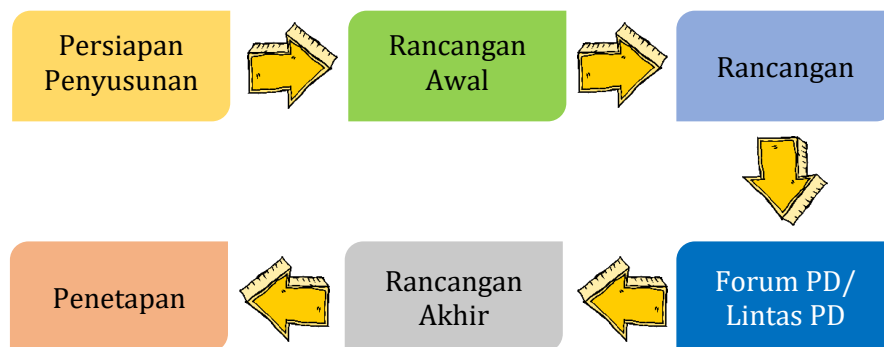
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Lampung disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dari sisi proses, penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024.

- Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2022 , dan Rancangan RKPD 2024).
2. Penyusunan rancangan
 - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana.
 - Desk dengan pengampu kegiatan.
 3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024.
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung.
 4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Pemangku Kepentingan yang terkait
 5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim
 - Diverifikasi oleh Tim Penyusunan RKPD Provinsi Lampung
 6. Penetapan



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah penjabaran dari Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2024 serta berdasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2024,

dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat, target kinerja dan ketersediaan alokasi anggaran.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 12) Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- 13) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerinth Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- 14) Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 801/143/SEK/VI.01/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun, tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2024 adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 pada tahun ke-5 periode Tahun 2024;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja BAPPEDA dengan Program prioritas RKPD dan Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024

Memuat Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024 terkait kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Menjelaskan unsur BAPPEDA sebagai pendukung Pemerintah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

Berisikan tema prioritas pada RKPD Tahun 2024 serta keselarasan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja BAPPEDA Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung, Menyajikan Sub Kegiatan Prioritas yang mengampu Indikator Kinerja pada Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

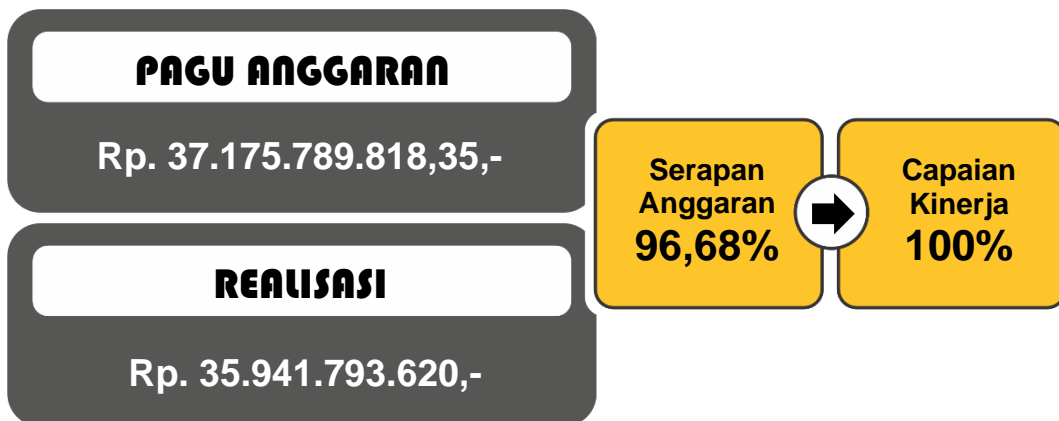
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu

Pada Tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2022. Anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp. 37.175.789.818,35,- yang terbagi dalam sasaran utama sebesar Rp. 7.410.873.100,- dan sasaran pendukung sebesar Rp. 29.764.916.718,35- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 37.175.789.818,35-.



Gambar 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 96,68%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 54 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2022, seluruhnya mencapai realisasi kinerja 100%. Lebih jelasnya terkait tingkat capaian anggaran selama tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 1 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 2.986.424.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.875.422.600,-. Pada Sasaran Utama I terdiri dari 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 96,28%. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran Utama I sebagai berikut :



1. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Jumlah berita acara konsultasi public dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan) dengan tingkat capaian 100%

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah keterisian E-Database n-1 dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI) dengan tingkat capaian 100%.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025, Evaluasi RKPD Tahun 2021 dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota dan Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%.

II. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran utama ke 2, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 4.424.449.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.078.790.100,- atau sebesar 92,19% sementara untuk tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Ada 1 sub kegiatan yang tingkat capaian anggarannya kurang



dari 50%, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur (49,43%). Program yang mendukung Sasaran Utama 2 tersebut adalah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Laporan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021
8. Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Jumlah Buku Peluang Investasi dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan Penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan Penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%.
8. Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakaryaannya Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Laporan Proceiding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.

III. Sasaran Pendukung : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran pendukung, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 29.764.916.718,35,- dapat terealisasi sebesar Rp. 28.987.580.920,- atau sebesar 97,39%. Dari 20 sub kegiatan yang mendukung sasaran pendukung seluruhnya mencapai capaian kinerja diatas 60%. Program yang mendukung Sasaran Pendukung tersebut adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan) dengan tingkat capaian 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan tingkat capaian 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah paket bahan/material yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%.
7. Jumlah paket bahan/material yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tingkat capaian 100%;
9. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan tingkat capaian 100%

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan tingkat capaian 100%.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan tingkat capaian 100%;
 2. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Mushola, Kamar Mandi Lt 1 dan 2, Ruang Arsip (Dipo Center) dan Paket Keramik Lt 2 dan 3 dengan tingkat capaian 100%.

2.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Untuk Capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian dan realisasi capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RRPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RRPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RRPD;	30%	42,77%	100%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RRPD 2022 sebanyak 470 usulan dari 1.099 total usulan awal.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan,	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	dengan indikator sasaran RPJMD;				indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100 %	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	90%	35%	35%*)	Pengukuran terhadap capaian berdasarkan capaian indikator sasaran RPJMD dilaksanakan pada awal tahun 2022
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	A	100%	Penilaian nilai SAKIP 2021 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada tahun 2021

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, di Tahun 2022 seluruh indikator kinerja mencapai 100%. Bahkan dua indikator melebihi target yang telah direncanakan yaitu indikator Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dan Nilai SAKIP BAPPEDA. Analisis terhadap pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

1. Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%

INDIKATOR 1.a

INDIKATOR KINERJA Penetapan RKPD Tepat Waktu

Target 2022	Realisasi 2022	Persentase 2022	Capaian 2022
Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2022.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan Desentralistik (Bottom-up Planning). Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang

tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mensinergikannya prioritas dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2021, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah termasuk di Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD yang mempunyai tujuan pokok yaitu menyelaraskan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas masing-masing PD, termasuk informasi tentang indikator

kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD.



Forum Konsultasi Publik Tahun 2022

Dalam penyusunan RKPD dilakukan integrasi antara prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi

Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

Indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan implementasi terhadap konsep “SMART” (*Specific, Measurable, attainable, realistic, time bond*) selama periode RPJMD dan PRPJMD Tahun 2019-2024 yang diuraikan dalam dokumen RKPD merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target indikator ini selama empat tahun berturut sejak awal periode RPJMD Tahun 2019-2022 secara konsisten oleh BAPPEDA Provinsi Lampung.

Bagi setiap pemerintah daerah termasuk Provinsi Lampung melalui BAPPEDA, proses menyusun, merumuskan dan menetapkan RKPD maupun Perubahan RKPD kriteria tepat waktu menjadi pokok penting perencanaan sehingga tidak terjadi pengingkaran atas kebijakan RPKD. Tercapainya indikator RKPD tepat waktu oleh

BAPPEDA Provinsi Lampung membuktikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan baik dan fungsi koordinasi dijalankan



Musrenbang Provinsi Lampung RKPD 2023

secara tepat dan benar, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah dikelola dengan tepat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bagi pemerintah daerah yang telah menyusun, merumuskan dan menetapkan RKPD maupun Perubahan RKPD tepat waktu pertanda perencanaan kerangka ekonomi Daerah, perencanaan pembangunan Daerah, serta perencanaan APBD akan berjalan baik dan benar. Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RKPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%.

Adapun realisasinya adalah sebesar 42,77% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-



RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

Usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Pokok-pokok pikiran (Pokir) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar dilakukan pembahasan APBD. Pokir memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena dalam pokir tersebut sering kali muncul usulan yang sifatnya inovatif, belum tersampaikan dalam musrenbang, dan belum diakomodir oleh Perangkat Daerah, usulan mengakar dari masyarakat dan sesuai kebutuhan.

Setelah mengalami penurunan tingkat capaian di Tahun 2021 yaitu sebesar 73% dikarenakan pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Tahun 2021, capaian indikator usulan stakeholder yang diakomodir dalam RKPD pada Tahun 2022 melampaui target yang telah

ditetapkan yaitu dengan capaian 42,77% dari target capaian sebesar 30%.

Jumlah usulan pikir yaitu sebanyak 1099 usulan ke 17 Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yang telah dibedah dibedah dan dielaborasi oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, sebanyak 42,77% atau 470 usulan telah diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Hal ini menunjukkan sinergi pembangunan antara *stakeholder* dan



Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Seiring perbaikan kondisi diberbagai sektor makro pasca pandemi, Pemerintah Provinsi Lampung ngusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022, yaitu **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas”**, pemerintah terus melakukan upaya Pemulihan Ekonomi melalui penguatan pada berbagai aspek pembangunan, diantaranya ketahanan pangan daerah, meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan kepada koperasi, kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis padat karya, mengaktifkan kembali roda bisnis secara berangsur, seraya memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Dengan kembalinya fokus pembangunan yang selama dua tahun terakhir terdistraksi akibat fokus penanganan kesehatan selama pandemi, maka usulan pembangunan atas partisipasi *stakeholder* dalam

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dapat diakomodir dan upaya kolaboratif dalam mempromosikan hak dasar warga dan barang-barang yang berkaitan erat sebagai kebutuhan publik (*public good*) telah berjalan dengan baik. Sebagai perwujudan system pemerintahan daerah yang demokratis, Pemerintah Provinsi Lampung bertindak secara proaktif menjemput partisipasi para pemangku kepentingan agar pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam mendesain tugas-tugasnya, dan dapat bersama- sama dalam mengelola setiap kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya

2. **Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator

sasaran 2.a adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun

realisasi nya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) atau Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Di lingkungan PD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan

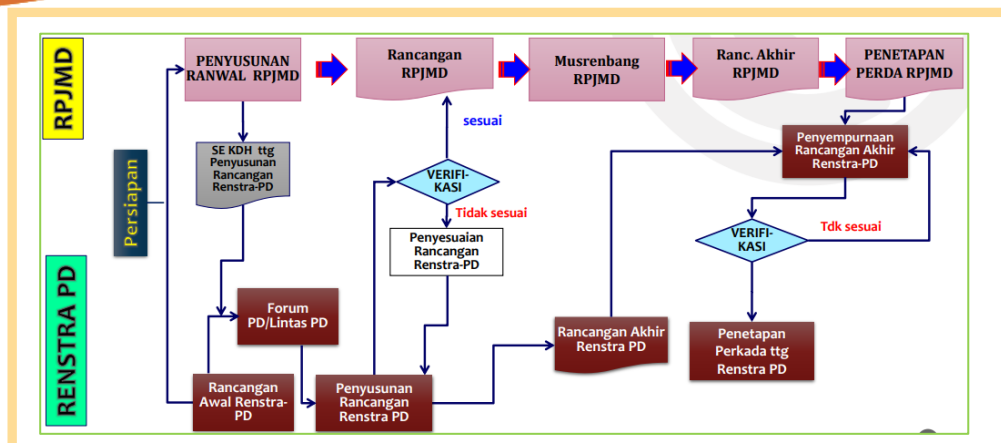


itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



Keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD

Indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, pentingnya Konsistensi RPJMD dan Renstra Perangkat daerah merupakan bagian krusial dari perencanaan pembangunan daerah, konsistensi keduanya dibutuhkan untuk memastikan keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun telah berpedoman pada RPJMD, serta memastikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD juga untuk dijadikan dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja



sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dimana 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD.

Selaras dengan capaian indikator kinerja Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD yang sudah mencapai persentase 100%, diikuti dengan capaian indikator persentase PD yang sasaran renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD juga melampaui target capaian yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lain dapat dicapai dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, indicator renja perangkat daerah telah diakomodir dan ditentukan sehingga tidak ada lagi indicator Renja Perangkat Daerah yang diluar dari surat keputusan tersebut.

INDIKATOR 2.C

INDIKATOR KINERJA

Persentase Target Sasaran RPJMD yang Target Tahunannya Tercapai

Target
2022

90%

Realisasi
2022

90%

Persentase
2022

90%

Capaian
2022

100%

Indikator

sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 90% atau sebanyak 19 indikator dari 20 indikator yang

ditargetkan mencapai 90%. Adapun realisasi nya adalah 100% dimana sebanyak 19 dari 20 indikator memiliki capaian diatas 95%

Meskipun selama dua tahun terakhir capaian ini telah mencapai 100% upaya peningkatan kinerja terhadap indikator ini telah dilakukan oleh BAPPEDA dengan didampingi oleh PD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) bersinergi untuk melakukan evaluasi capaian kinerja kepada Perangkat Daerah yang menjadi pengampu Indikator Kinerja Kepala Daerah dan melakukan penyesuaian jumlah dari target indikator kinerja perangkat daerah dengan kemampuan fiskal daerah.

3. **Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.**

SASARAN PENDUKUNG

INDIKATOR KINERJA

Nilai Sakip BAPPEDA

Target
2022

BB

Realisasi
2022

A

Persentase
2022


100%

Capaian
2022

100%

Selain indikator sasaran utama, indikator sasaran pendukung juga diperlukan dalam hal mengukur penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan

perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset sebagai penunjang kinerja sasaran



utama . Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat di Tahun Penilaian 2021. Target yang ditetapkan yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerja nya telah melampaui target yaitu BAPPEDA memperoleh predikat SAKIP “A” berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada Bulan Juli Tahun 2022.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dengan diraihnya predikat “A” oleh BAPPEDA mengindikasikan bahwa tata Kelola pemerintahan di BAPPEDA Provinsi Lampung telah berjalan dengan sangat baik dan memuaskan.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
BAPPEDA Provinsi Lampung

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan)	34	1.169.055.590,00	0	0	12	207.578.000	12	198.631.400,00	100	95,69	12	198.631.400,00	35,294	16,991	
2	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	21	777.144.970,00	0	0	6	117.100.000	6	111.759.100,00	100	95,44	6	111.759.100,00	28,571	14,381	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
3	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	345	50.235.351.421,00	0	0	115	18.464.670.036	115	18.091.118.562,00	100	97,98	115	18.091.118.562,00	33,333	36,013	
4	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	6	339.023.440,00	0	0	2	102.547.692	2	84.640.500,00	100	82,54	2	84.640.500,00	33,333	24,966	

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
5	5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	9	182.050.000,00	0	0	3	55.000.000	3	54.779.500,00	100	99,60	3	54.779.500,00	33,333	30,09
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
6	5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	390	416.950.000,00	0	0	275	139.750.000	275	139.750.000,00	100	100,00	275	139.750.000,00	70,513	33,517
7	5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90	412.674.080,00	0	0	30	86.679.000	39	86.678.500,00	100	99,999	39	86.678.500,00	43,333	21,004
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
8	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	1.238.112.000,00	0	0	12	2.004.483.100	12	1.975.137.600,00	100	98,54	12	1.975.137.600,00	33,333	159,53
9	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	36	33.100.000,00	0	0	12	11.978.040	12	11.804.300,00	100	98,55	12	11.804.300,00	33,333	35,663
10	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	62.780.000,00	0	0	12	16.580.000	12	16.545.800,00	100	99,79	12	16.545.800,00	33,333	26,355
11	5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	36	89.337.919,00	0	0	12	19.953.950	12	19.935.720,00	100	99,91	12	19.935.720,00	33,333	22,315
12	5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3	217.800.000,00	0	0	1	107.400.000	1	105.754.000,00	100	98,47	1	105.754.000,00	33,333	48,556
13	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	1.163.457.361,00	0	0	1	5.128.346.000	1	5.036.176.359,00	100	98,20	1	5.036.176.359,00	33,333	432,86

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
14	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75	1.045.713.000,00	0	0	117	908.994.000	117	882.881.500,00	100	97,13	117	882.881.500,00	156	84,429
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
15	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	1.403.440.000,00	0	0	1	424.000.000	1	260.217.964,00	100	61,37	1	260.217.964,00	33,333	18,541
16	5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	143.290.000,00	0	0	1	27.790.000	1	27.790.000,00	100	100,00	1	27.790.000,00	33,333	19,394
17	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	3	3.121.521.400,00	0	0	2	1.023.784.760	2	991.280.600,00	100	96,83	2	991.280.600,00	66,667	31,756
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
18	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	41	980.760.000,00	0	0	13	307.900.000	13	283.170.375,00	100	91,97	13	283.170.375,00	31,707	28,873
19	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	750	114.178.600,00	0	0	270	21.778.600	270	21.778.600,00	100	100,00	270	21.778.600,00	36	19,074

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5		
20	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Mushola, Kamar Mandi Lt 1 dan 2, Ruang Arsip (Dipo Center) dan Paket Keramik Lt 2 dan 3	9	2.019.622.166,00	0	0	4	588.603.540	4	587.750.540,00	100	99,86	4	587.750.540,00	44,444	29,102	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																		
21	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	3	652.000.000,00	0	0	1	92.020.000	1	87.146.000,00	100	94,70	1	87.146.000,00	33,333	13,366	
22	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	3	1.485.700.000,00	0	0	1	247.886.000	1	241.079.000,00	100	97,25	1	241.079.000,00	33,333	16,227	
23	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan)	8	4.150.990.000,00	0	0	2	502.310.000	2	452.618.600,00	100	90,11	2	452.618.600,00	25	10,904	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																		
24	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1	9	655.458.140,00	0	0	3	156.690.500	3	156.440.500,00	100	99,84	3	156.440.500,00	33,333	23,867	
25	5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	225	1.978.927.500,00	0	0	75	599.395.500	75	568.084.400,00	100	94,78	75	568.084.400,00	33,333	28,707	

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
26	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	180	741.788.000,00	0	0	60	189.238.000	60	189.188.000,00	100	99,97	60	189.188.000,00	33,333	25,504
27	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	6	2.359.350.000,00	0	0	2	395.563.000	2	395.560.200,00	100	99,999	2	395.560.200,00	33,333	16,766
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	
28	5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	6	981.583.479,00	0	0	2	50.358.900	2	48.104.900,00	100	95,52	2	48.104.900,00	33,333	4,9007
29	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025, Evaluasi RKPD Tahun 2021 dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2022	9	2.130.812.500,00	0	0	3	501.653.000	3	492.722.000,00	100	98,22	2	492.722.000,00	22,222	23,124

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
30	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota	9	1.675.578.932,00	0	0	3	251.309.200	3	244.479.000,00	100	97,28	3	244.479.000,00	33,333	14,591
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
31	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	3	1.047.285.000,00	0	0	1	39.322.000	1	38.972.000,00	100	99,11	1	38.972.000,00	33,333	3,7212
32	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	30	639.265.000,00	0	0	10	220.000.000	10	219.090.500,00	100	99,59	10	219.090.500,00	33,333	34,272

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
33	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	30	732.775.000,00	0	0	10	214.180.000	10	212.346.800,00	100	99,14	10	212.346.800,00	33,333	28,978
34	5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	822.285.000	0	0	1	150.000.000	1	149.828.000	100	99,89	1	149.828.000	33,333	18,221
35	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	3	1.350.311.000,00	0	0	1	237.114.000	1	236.189.000,00	100	99,61	1	236.189.000,00	33,333	17,491
36	5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18	619.265.000,00	0	0	6	406.220.000	6	406.045.000,00	100	99,96	6	406.045.000,00	33,333	65,569

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
37	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	18	742.723.200,00	0	0	6	154.688.200	6	154.163.200,00	100	99,66	6	154.163.200,00	33,333	20,756
38	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	3	773.426.800,00	0	0	2	305.651.800	2	304.051.800,00	100	99,48	2	304.051.800,00	66,667	39,312
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																	
39	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Buku Peluang Investasi	3	1.220.498.231,00	0	0	1	74.352.300	1	63.552.300,00	100	85,47	1	63.552.300,00	33,333	5,2071
40	5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan Penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung	15	1.013.899.194,00	0	0	5	151.640.000	5	139.160.000,00	100	91,77	5	139.160.000,00	33,333	13,725

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
41	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan penyusunan dokumen Laporan Movev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	15	901.768.948,00	0	0	5	79.114.600	5	67.674.600,00	100	85,54	5	67.674.600,00	33,333	7,5046
42	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	3	631.010.234,00	0	0	1	147.150.900	1	141.050.000,00	100	95,85	1	141.050.000,00	33,333	22,353
43	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	3	642.389.250,00	0	0	4	41.879.000	4	34.659.000,00	100	82,76	4	34.659.000,00	133,33	5,3953
44	5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan Penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	12	694.032.400,00	0	0	4	129.978.400	4	121.553.600,00	100	93,52	4	121.553.600,00	33,333	17,514

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
45	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	12	1.032.851.350,00	0	0	4	83.022.000	4	79.482.000,00	100	95,74	4	79.482.000,00	33,333	7,6954
46	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	3	964.096.459,00	0	0	1	22.227.800	1	20.119.300,00	100	90,51	1	20.119.300,00	33,333	2,0869
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																	
47	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah	3	1.886.699.980,00	0	0	1	366.451.900	1	325.293.900,00	100	88,77	1	325.293.900,00	33,333	17,241

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
48	5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	12	846.500.000	0	0	4	500.000.000	4	450.082.800	100	90,02	4	450.082.800	33,333	53,17
49	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	12	670.275.000,00	0	0	4	13.936.000	4	6.888.000,00	100	49,43	4	6.888.000,00	33,333	1,0276
50	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	600.765.000,00	0	0	1	205.696.000	1	173.869.000,00	100	84,53	1	173.869.000,00	33,333	28,941
51	5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	3	2.068.389.100,00	0	0	1	408.892.100	1	291.323.100,00	100	71,25	1	291.323.100,00	33,333	14,085

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
52	5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	15	601.365.000	0	0	5	103.792.000	5	102.442.000	100	98,70	5	102.442.000	33,333	17,035
53	5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	15	670.275.000	0	0	5	36.212.000	5	31.760.000	100	87,71	5	31.760.000	33,333	4,7384
54	5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	3	2.013.657.440	0	0	2	332.928.000	2	309.194.200	100	92,87	2	309.194.200	66,667	15,355
Capaian Kinerja dan Keuangan												100,00	96,68				

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang utama berkaitan dengan fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yaitu fokus pada : (1) Perumusan kebijakan dan Penyusunan rencana pembangunan daerah, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, OPD dan Kabupaten/Kota, (3) Pembinaan pada OPD dan Kabupaten/Kota. Pada tabel berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2019-2024

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
SASARAN UTAMA													
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	--	--	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2.	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	--	--	30%	30%	31%	31%	42,77%	30%	31%	31%		
3.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	--	--	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	--	--	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	--	--	85%	90%	95%	95%	90%	90%	95%	95%		
SASARAN PENDUKUNG													
1.	Nilai SAKIP (Bappeda)	--	--	BB	BB	A	A	A	A	A	A		

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 :

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu

pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;

2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu).

Dalam melaksanakan hal-hal di atas, fungsi strategis BAPPEDA dapat berjalan dengan optimal apabila di dukung dengan segala sumber daya yang menjadi potensi BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai organisasi Perangkat Daerah. Faktor eksternal dan internal baik sebagai kelemahan maupun kekuatan sangat menentukan bagaimana BAPPEDA dapat melaksanakan tugas organisasinya secara optimal.

2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke 5 dari Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 mengusung Tema “***Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya***”, akan menjadi salah satu bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Setelah lebih kurang 3 Tahun kita mengalami dampak dari krisis Covid-19, pada Tahun 2023 Pemerintah Sudah Menetapkan Covid-19 bukan lagi sebagai Pandemi melainkan Endemi.

Arah kebijakan Pembangunan yang akan dilakukan adalah memantapkan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan SDM yang inovatif. Oleh karenanya, diperlukan reformulasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, serta penyesuaian terhadap kerangka pendanaan dan target kinerja; yang perlu dituangkan secara formal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk program dan kegiatan yang dirumuskan oleh perangkat daerah.

Memperhatikan pokok uraian tersebut, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA tentunya perlu mendukung dan sejalan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 maupun tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA, dimana BAPPEDA terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu “Mewujudkan “good govemance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Tinjauan terhadap RKPD Provinsi Lampung mengisyaratkan bahwa pembangunan di tahun 2024 akan berfokus pada memantapkan kemajuan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat. Disaat yang bersamaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan pada pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mendukung pencapaian visi-misi pemerintah daerah, penyusunan kerangka pokok rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA tahun 2024 juga diselaraskan Perubahan Renstra BAPPEDA dan pokok arahan dalam RKPD Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Reviu terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	7.489.938.141	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	8.051.683.502	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	3.360.200.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	3.612.215.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung	Jumlah berita acara konsultasi publik	48 Berita Acara	242.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	260.150.000	
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Lampung	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	568.700.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Lampung	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	611.352.500	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	2.549.500.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah dokumen RKPd (Murni dan Perubahan)	4 Dokumen	2.740.712.500	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%	1.979.451.240	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%	2.127.910.083	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	75 Masukan	244.231.240	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N-1	3 Masukan	262.548.583	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lampung	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	80 Orang	665.500.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lampung	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah dokumen kajian PNPB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	45 Orang	715.412.500	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	60 Orang	262.570.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	40 Orang	282.262.750	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	807.150.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Lampung	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	867.686.250	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	1.750.286.901	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	1.881.558.419	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Lampung	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 Laporan	358.826.589	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Lampung	Jumlah Laporan Dekon/TP/ DAK dan laporan monitoring	2 Laporan	385.738.583	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 Laporan	778.937.500	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Program serta Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKPd Tahun 2022	3 Laporan	837.357.813	
Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	3 Dokumen	612.522.812	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung	Jumlah dokumen hasil fasilitas Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil	3 Dokumen	658.462.023	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/Kota			
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	400.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	430.000.000	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	161.250.000	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	107.500.000	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	161.250.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan movev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%	8.292.999.506	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan movev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%	8.914.974.469	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	2.381.576.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	2.560.194.200	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	391.435.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	420.792.625	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	1 Perangkat Daerah	219.615.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	236.086.125	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	1 Perangkat Daerah	245.025.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	10 Perangkat Daerah	263.401.875	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	340.435.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	365.967.625	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	445.401.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	478.806.075	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Perangkat Daerah	219.615.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	236.086.125	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Perangkat Daerah	275.025.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	6 Perangkat Daerah	295.651.875	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	245.025.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	1 Laporan	263.401.875	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	2.559.112.006	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	2.751.045.406	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	1 Dokumen	445.364.821	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Lampung	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	2 Dokumen	478.767.183	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	373.015.654	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	5 Perangkat Daerah	400.991.828	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	361.851.468	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	5 Perangkat Daerah	388.990.328	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	170.139.794	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	182.900.279	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	1 Dokumen	216.535.550	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Lampung	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	232.775.716	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	206.184.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	221.647.800	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	41 Perangkat Daerah	434.855.850	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian,	4 Perangkat Daerah	467.470.039	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	351.164.869	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lampung	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	377.502.234	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	3.352.311.500	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	3.603.734.863	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	693.205.460	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pengembangan Wilayah	2 Dokumen	745.195.870	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	181.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	4 Perangkat Daerah	195.112.500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	245.025.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	263.401.875	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	219.615.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	236.086.125	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	758.315.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	1 Dokumen	815.188.625	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Wilayah	1 Perangkat Daerah	219.615.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Wilayah	5 Perangkat Daerah	236.086.125	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Wilayah	1 Perangkat Daerah	245.025.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Wilayah	5 Perangkat Daerah	263.401.875	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Lampung	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Wilayah	1 Laporan	790.011.040	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Lampung	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	2 Laporan	849.261.868	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	23.394.530.811	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	25.149.120.622	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100%	711.450.960	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100%	764.809.782	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	427.358.690	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)	11 Dokumen	459.410.592	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	284.092.270	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	6 Laporan	305.399.190	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100%	18.369.393.661	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100%	19.747.098.186	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang	18.245.460.621	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	123 Orang	19.613.870.168	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	123.933.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	133.228.018	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100%	66.550.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100%	71.541.250	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Dokumen	66.550.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	71.541.250	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%	266.200.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%	286.165.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150 Paket	145.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	149 Paket	156.090.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang	121.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	104 Orang	130.075.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100%	1.020.556.191	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	1.097.097.905	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Paket	450.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	483.750.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12.100.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	13.007.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	24.200.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	26.015.000	
Penyediaan Bahan/Material	Lampung	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	36.343.984	Penyediaan Bahan/Material	Lampung	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Paket	39.069.783	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Lampung	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	72.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Lampung	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	78.045.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250 Laporan	425.312.207	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	457.210.623	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	156.090.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	167.796.750		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	156.090.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	139 Unit	167.796.750		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%	1.529.513.800	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%	1.644.227.335		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	513.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	551.518.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	60.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	65.037.500		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	955.973.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampung	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	1.027.671.835		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	1.274.776.199	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	1.370.384.414		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	289.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 Unit	310.879.250		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	48.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	330 Unit	52.030.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Paket	937.186.199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Musholla + Ruang Laktasi dan Kamar Mandi Lt. I dan II	2 Paket	1.007.475.164		
TOTAL				39.177.468.458	TOTAL				42.115.778.592		

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Hasil penelaahan terhadap usulan pemangku kepentingan, usulan lebih banyak ditujukan untuk perangkat daerah teknis terkait infrastruktur dan pertanian. Khusus usulan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk Bappeda Provinsi Lampung secara substansi hanya berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung. Usulan DPRD Provinsi Lampung menekankan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi e-Pokir sehingga hasil Reses Anggota DPRD dapat segera diusulkan dan dibahas melalui aplikasi e-Reses. Memastikan aplikasi e-Reses dapat menjamin seluruh program dan kegiatan usulan masyarakat dapat diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah : ***“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

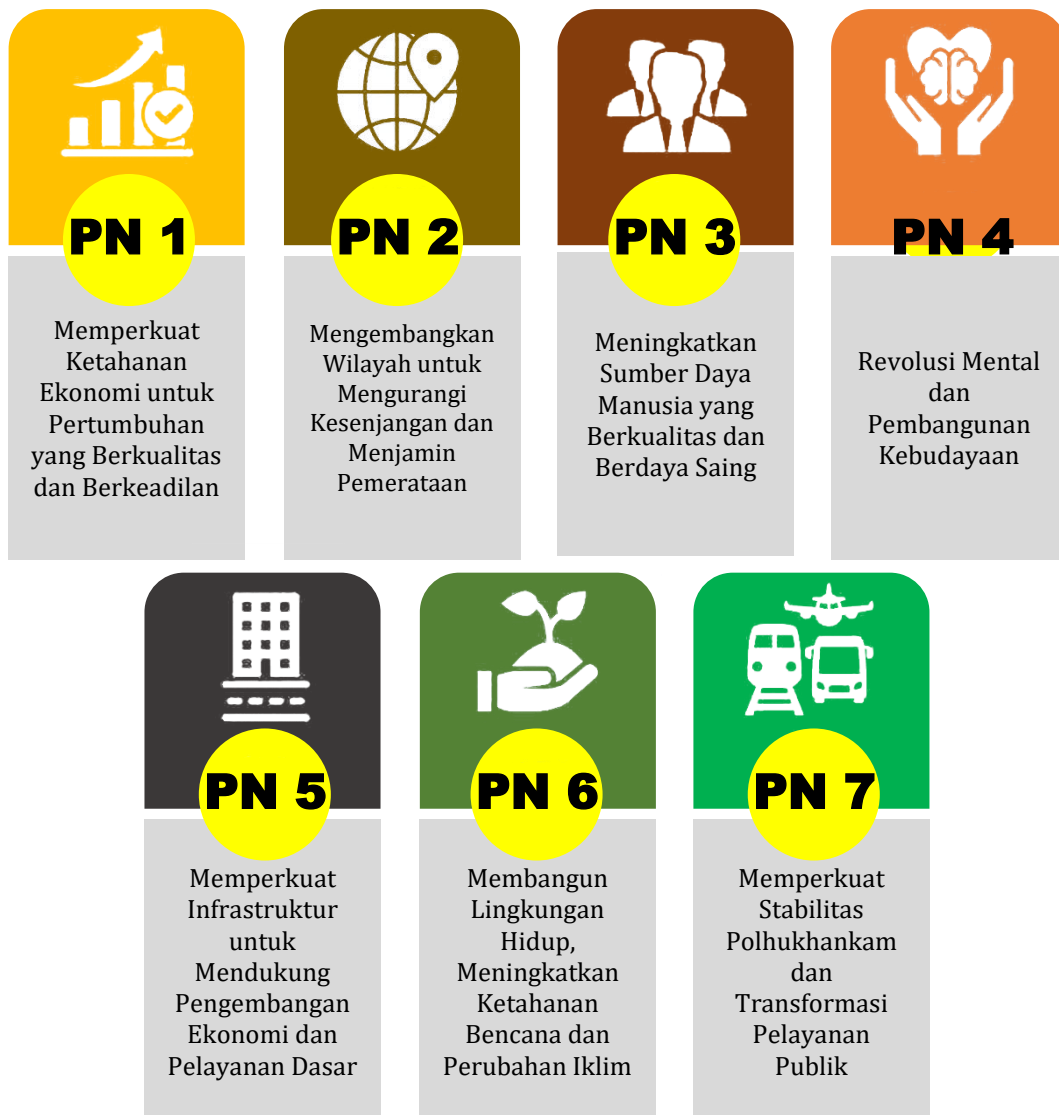


Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :

- 
- Pembangunan SDM**
1 Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
 - Pembangunan**
2 Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
 - Penyederhanaan**
3 Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menertibkan 2 Undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
 - Penyederhanaan**
4 Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi
 - Transformasi Ekonomi**
5 Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini, maka untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 “ **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” melalui 7 (tujuh) prioritas nasional, meliputi :



Guna mendukung pokok-pokok prioritas pembangunan nasional tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 diarahkan pada beberapa fokus pembangunan yang meliputi : industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi

kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

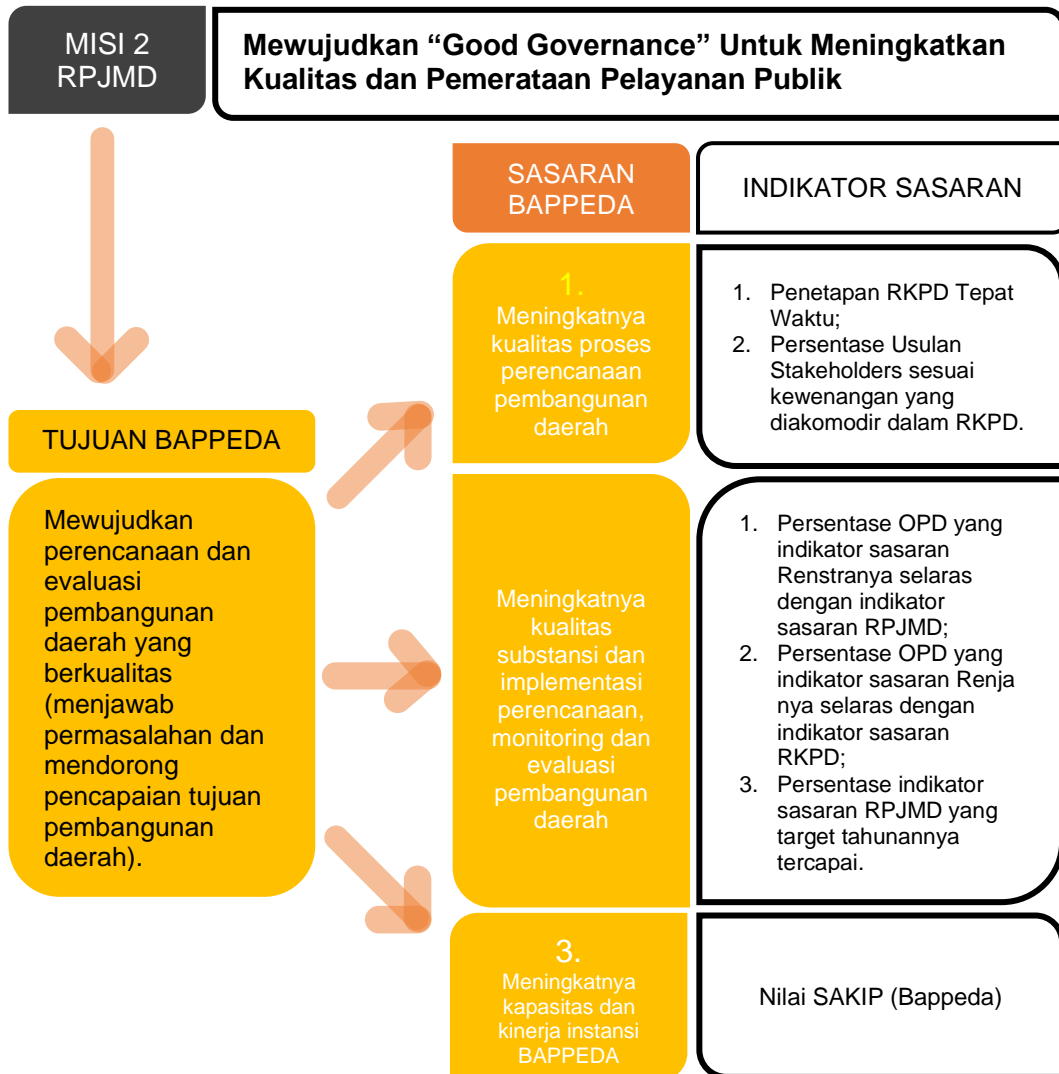
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Provinsi Lampung

Mengacu pada Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 RPJMD Provinsi Lampung, yaitu **“Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran pada Perubahan RPJMD yaitu **“Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi”**.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan RPJMD

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA selama Tahun 2019– 2024 adalah **“Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (planning by research).



Gambar 3.1 Cascading Misi P RPJMD s/d Tujuan dan Sasaran BAPPEDA

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan.

Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
RPJMD Provinsi Lampung								
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik" ✚ Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ✚ Sasaran : Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi ✚ Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi 								
RENSTRA OPD								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka seluruh nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan Renja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan proses “pemetaan” sebagaimana telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pada Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 akan melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PROSES PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01				PERENCANAAN								
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	7.489.938.141		100 %	8.238.931.955,10		
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %	3.360.200.000		100 %	3.696.220.000		
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Lampung	1 Berita Acara	242.000.000	APBD		1 Berita Acara	266.200.000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	Lampung	1 Berita Acara	568.700.000	APBD		1 Berita Acara	625.570.000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Lampung	2 Dokumen	2.549.500.000	APBD		2 Dokumen	2.804.450.000
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100 %	1.979.451.240					2.177.396.364
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Lampung	1 Dokumen	244.231.240	APBD		1 Dokumen	268.654.364
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Lampung	75 Orang	665.500.000	APBD		75 Orang	732.050.000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Lampung	60 Orang	262.570.000	APBD		60 Orang	288.827.000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Lampung	2 Buku	807.150.000,00	APBD		2 Buku	887.865.000

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
														(1)
5	01	02	1.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota		100%	1.750.268.901				1.925.315.591
5	01	02	1.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Lampung	2 Laporan	358.826.589	APBD		2 Laporan	394.709.248
5	01	02	1.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Lampung	3 Laporan	778.937.500	APBD		3 Laporan	856.831.250
5	01	02	1.03	04		Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota yang difasilitasi/ evaluasi	Lampung	3 Dokumen	612.522.812	APBD		3 Dokumen	673.775.093
5	01	02	1.04			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah			400.000.000				440.000.000
5	01	02	1.03	01		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Lampung	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	165.000.000
5	01	02	1.03	02		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Lampung	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	110.000.000
5	01	02	1.03	03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Lampung	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	165.000.000
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah		100 %	8.292.999.506			100 %	9.122.299.457
5	01	03	1.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia		100 %	2.381.576.000			100 %	2.619.733.600
5	01	03	1.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	391.435.000	APBD		1 Dokumen	430.578.500

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
										(1)	(2)	(3)	(4)
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	1 Laporan	219.615.000	APBD		1 Laporan	241.576.500
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung	1 Laporan	245.025.000	APBD		1 Laporan	269.527.500
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lampung	1 Laporan	340.435.000	APBD		1 Laporan	374.478.500
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	1 Dokumen	445.401.000	APBD		1 Dokumen	489.941.100
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	1 Laporan	219.615.000	APBD		1 Laporan	241.576.500
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung	1 Laporan	275.025.000	APBD		1 Laporan	302.527.500
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lampung	2 Laporan	245.025.000	APBD		2 Laporan	269.527.500
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA		100 %	2.559.112.006			100 %	2.815.023.207
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung	2 Dokumen	445.364.821	APBD		2 Dokumen	489.901.303
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	1 Laporan	373.015.654	APBD		1 Laporan	410.317.219
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung	1 Laporan	361.851.468	APBD		1 Laporan	398.036.615

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025											
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF										
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lampung	1 Laporan	170.139.794	APBD			1 Laporan	187.153.773					
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Lampung	1 Dokumen	216.535.550	APBD			1 Dokumen	238.189.105					
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	1 Laporan	206.184.000	APBD			1 Laporan	226.802.400					
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung	1 Laporan	434.855.850	APBD			1 Laporan	478.341.435					
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang SDA	Lampung	1 Laporan	351.164.869	APBD			1 Laporan	386.281.356					
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		100 %	3.352.311.500				100 %	3.687.542.650					
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Lampung	1 Dokumen	693.205.460	APBD			1 Dokumen	762.526.006					
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	1 Laporan	181.500.000	APBD			1 Laporan	199.650.000					
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung	1 Laporan	245.025.000	APBD			1 Laporan	269.527.500					
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lampung	1 Laporan	219.615.000	APBD			1 Laporan	241.576.500					
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Lampung	1 Dokumen	758.315.000	APBD			1 Dokumen	834.146.500					

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
										(1)	(2)	(3)	(4)
	Bidang Kewilayahan (RPJD, RPJMD dan RKPJMD)												
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	1 Laporan	219.615.000	APBD		1 Laporan	241.576.500
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung	1 Laporan	245.025.000	APBD		1 Laporan	269.527.500
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Lampung	2 Laporan	790.011.040	APBD		1 Laporan	869.012.144
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	23.394.530.811			100 %	25.733.983.892
5	01	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu		100 %	711.450.960			100 %	782.596.056
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Lampung	11 Dokumen	427.358.690	APBD		11 Dokumen	470.094.559
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lampung	7 Laporan	284.092.270	APBD		7 Laporan	312.501.497
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu		100 %	18.369.393.661			100 %	20.206.333.027
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Lampung	115 Orang	18.245.460.621	APBD		115 Orang	20.070.006.683
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Lampung	2 Laporan	123.933.040	APBD		2 Laporan	136.326.344
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu		100 %	66.550.000			100 %	73.205.000
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Lampung	3 Laporan	66.550.000	APBD		3 Laporan	73.205.000
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah		100 %	266.200.000			100 %	292.820.000
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Lampung	275 Paket	145.200.000	APBD		275 Paket	159.720.000

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Lampung	90 Orang	121.000.000	APBD		50 Orang	133.100.000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran		100 %	1.020.556.191			100 %	1.122.611.810
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lampung	12 Paket	450.000.000	APBD		12 Paket	495.000.000
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Lampung	12 Paket	12.100.000	APBD		12 Paket	13.310.000
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Lampung	12 Paket	24.200.000	APBD		12 Paket	26.620.000
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Lampung	12 Paket	36.343.984	APBD		12 Paket	39.978.382
5	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lampung	1 Laporan	72.600.000	APBD		1 Laporan	79.860.000
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lampung	1 Laporan	425.312.207	APBD		1 Laporan	467.843.428
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	156.090.000			100 %	171.699.000
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Lampung	116 Unit	156.090.000	APBD		116 Unit	171.699.000
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran		100 %	1.529.513.800			100 %	1.682.465.180
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung	1 Laporan	513.040.000	APBD		1 Laporan	564.344.000
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lampung	1 Laporan	60.500.000	APBD		1 Laporan	66.550.000
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lampung	1 Laporan	955.973.800	APBD		1 Laporan	1.051.571.180
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran		100 %	1.274.776.199			100 %	1.402.253.819

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
										(1)	(2)	(3)	(4)
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Lampung	14 Unit	289.190.000	APBD		14 Unit	318.109.000
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Lampung	250 Unit	48.400.000	APBD		250 Unit	53.240.000
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Lampung	3 Paket	937.186.199,00	APBD		3 Paket	1.030.904.819
TOTAL									39.177.468.458				43.095.215.304

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



4.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

Berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung :



Gambar 4.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung

Guna menyelaraskan kesinambungan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan pula Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 yang bertajuk: **“Pemantapan Transformasi ekonomi yang kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya”**. Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung tahun 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading BAPPEDA Provinsi Lampung untuk pencapaian tujuan Tahun 2019-2024, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung

Memperhatikan Prioritas Pembangunan yang terdapat pada RKPD tersebut, BAPPEDA sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan berada pada Prioritas ke-4 yaitu “Reformasi Birokrasi”. Untuk itu BAPPEDA menyusun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2024 berdasarkan Prioritas yang dukung BAPPEDA yaitu 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut, Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Prioritas BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Provinsi Lampung	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	7.489.938.141	
Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	31%	Provinsi Lampung	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	3.360.200.000	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	242.000.000	
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	568.700.000	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan), Ranwal RPJPD 2025-2045, Teknokratis RPJMD 2025-2030	4 Dokumen	2.549.500.000	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100 %	1.979.451.240	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan	1 Dokumen	244.231.240				

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	75 Orang	665.500.000	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	60 Orang	262.570.000	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	807.150.000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	1.750.268.901	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	2 Laporan	358.826.589	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, Evaluasi RPJMD 2019-2024	3 Laporan	778.937.500	
			Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota	3 Dokumen	612.522.812	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		400.000.000	
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Dokumen	150.000.000	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan	1 Dokumen	150.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi			
Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	Provinsi Lampung	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100 %	8.292.999.506	
Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100%	Provinsi Lampung	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100 %	2.381.576.000	
Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	95%	Provinsi Lampung	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	391.435.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	219.615.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	245.025.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	340.435.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	445.401.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	219.615.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	275.025.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	2 Laporan	245.025.800	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100 %	2.559.112.006	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	2 Dokumen	445.364.821	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	373.015.654	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	361.851.468	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	170.139.794	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	216.535.550	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	206.184.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan	434.855.850	

Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	351.164.869	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	3.352.311.500	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	693.205.460	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	181.500.000	

Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	245.025.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	219.615.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	1 Dokumen	758.315.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	219.615.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Laporan	245.025.000	

Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	2 Laporan	790.011.040	
Nilai SAKIP	BB	Provinsi Lampung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	23.394.530.811	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100 %	711.450.960	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni,	11 Dokumen	427.358.690	

Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
				PK Perubahan, Rencana Aksi, Renja RB, GAP dan GBS, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan)			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	7 Laporan	284.092.270	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100 %	18.369.393.661	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang	18.245.460.621	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	123.933.040	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100 %	66.550.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	66.550.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100 %	266.200.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	275 Paket	145.200.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90 Orang	121.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100 %	1.020.556.191	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	450.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12.100.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	24.200.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	36.343.984	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	72.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	425.312.207	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	156.090.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	116 Unit	156.090.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100 %	1.529.513.800	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	513.040.000	

Prioritas Perangkat Daerah (1)	Target (2)	Lokasi (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator (5)	Target (6)	Pagu Indikatif (7)	Keterangan (8)
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	60.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	955.973.800	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100 %	1.274.776.199	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	289.190.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	270 Unit	48.400.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	937.186.199	
Jumlah Total						39.177.468.458	

Penyusunan Renja Tahun 2024 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) BAPPEDA Provinsi Lampung. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2024.

Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan pelaksana BAPPEDA Provinsi Lampung merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2024 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BAPPEDA dan kinerja pegawai.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

BAPPEDA Provinsi Lampung dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun dokumen perencanaan dan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di BAPPEDA yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

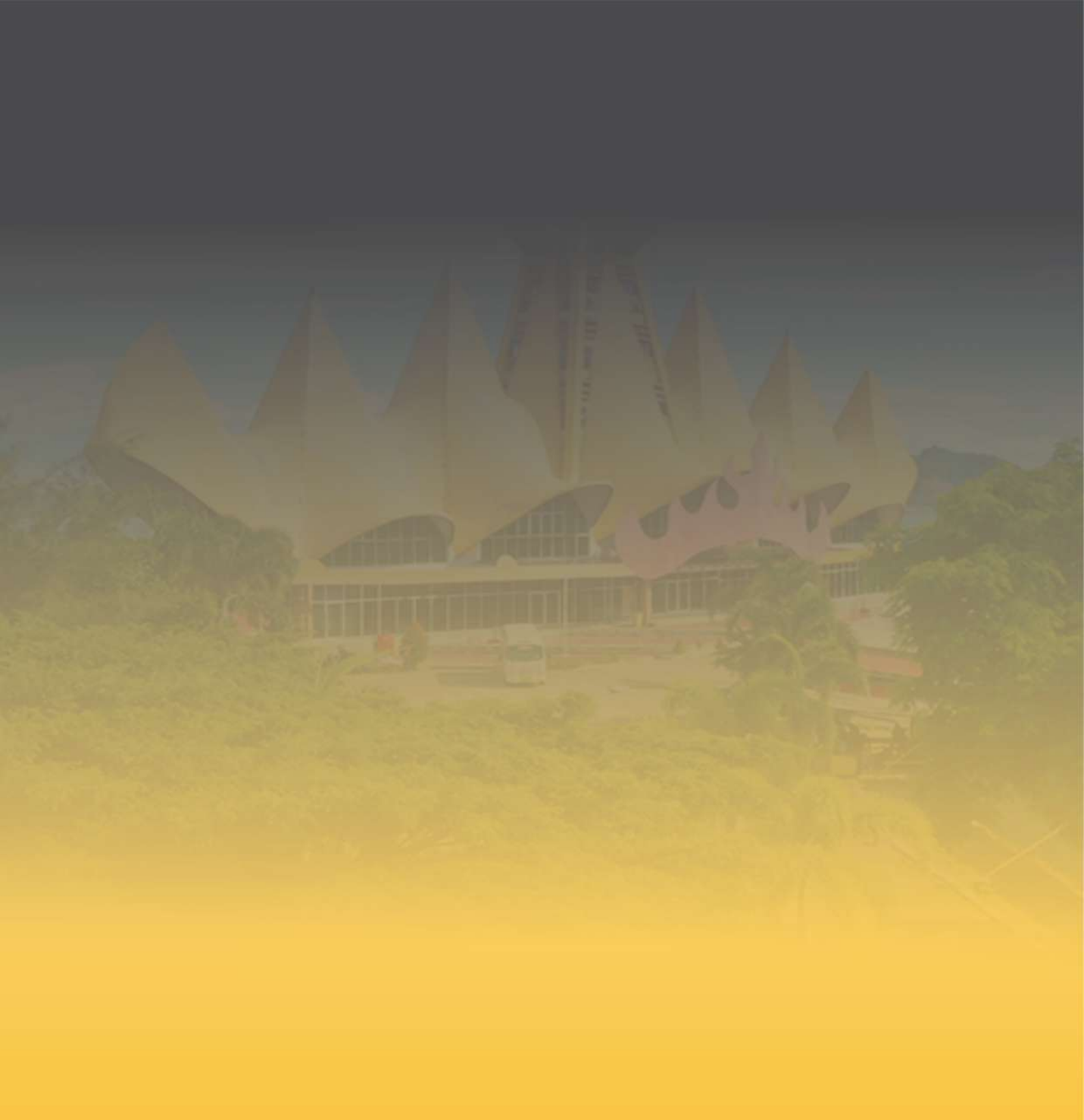
- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra PD);
- b. Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024, rencana tindaklanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindaklanjut tersebut antara lain :

- a. Dalam rangka menjaga kesimbangan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b. Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPPEDA Provinsi Lampung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.



BAPPEDA

PROVINSI LAMPUNG



Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,
Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35119